

## Bedah Menoreh tourism infrastructure development policy and its challenges in encouraging economic growth of the local community

### Kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata Bedah Menoreh dan tantangannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat

Ebtana Sella Mayang Fitri<sup>1\*</sup>, Ridho Gata Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

---

#### ARTICLE INFO

##### Keywords:

Bedah Menoreh programme; Economic Growth; Government Policy; Infrastructure

##### Katakunci:

Bedah Menoreh; Infrastruktur; Kebijakan Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi

##### DOI:

<https://doi.org/10.26905/jpp.v7i2.6140>

##### Corresponding Author:

Ebtana Sella Mayang Fitri  
[ebtanasella@uny.ac.id](mailto:ebtanasella@uny.ac.id)

#### ABSTRACT

*Borobudur is one of the New Bali sites that has had a significant impact on the tourism industry as well as infrastructure development. The opening of the Yogyakarta International Airport is one of the driving factors. The existence of YIA Airport is intended to be able to connect directly with Borobudur Temple. Therefore, good access is required by establishing the Bedah Menoreh route as the primary tourism route. The focus in infrastructure development is to encourage the economy of the local people in four different sub-districts. The Menoreh route, on the other hand, has allowed investors to engage in the development of tourism in the area. By monitoring the statistics and some facts that occur in the field, this article explores the development policy of Bedah Menoreh's tourism infrastructure and its difficulties to the local community's economic development. A qualitative method was utilized, including secondary data sources in the form of linked policies and reports from diverse sources. The purpose of this paper is to identify the projected Bedah Menoreh infrastructure development program and determine whether it is in conformity with the government's objectives for boosting the local economy. This article concludes that the development of the Bedah Menoreh Route as a supporter of tourism infrastructure is a good idea, but in determining policies it also requires synergy with the local community in order to have a positive impact on welfare in terms of economic, social, cultural, and environmental aspects.*

#### HOW TO CITE ITEM

Fitri, E., & Wijaya, R. (2022). Bedah Menoreh tourism infrastructure development policy and its challenges in encouraging economic growth of the local community. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.26905/jpp.v7i2.6140>

#### ABSTRAK

Borobudur merupakan salah satu destinasi New Bali telah memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata serta mendorong pembangunan di bidang infrastruktur. Salah satu pendorongnya adalah pembukaan bandara baru YIA (Yogyakarta International Airport). Keberadaan Bandara YIA dimaksudkan untuk dapat menghubungkan langsung dengan Candi Borobudur. Oleh sebab itu dibutuhkan akses yang baik dengan membuka jalur Bedah Menoreh sebagai jalur utama Pariwisata. Fokus dalam Pembangunan Infrastruktur tersebut adalah mendorong perekonomian masyarakat yang berada di empat kecamatan berbeda. Akan tetapi, Jalur Menoreh justru telah membuka akses bagi investor untuk turut mengembangkan wisata di kawasan tersebut. Makalah ini mempelajari tentang kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata Bedah Menoreh dan tantangannya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat dengan mengamati data dan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan

terkait dan laporan-laporan dari berbagai sumber. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi rencana program pembangunan infrastruktur Bedah Menoreh dan mengidentifikasi apakah program tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat setempat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan jalur dari Bedah Menoreh sebagai pendukung infrastruktur pariwisata merupakan gagasan yang baik, akan tetapi dalam penentuan kebijakan juga memerlukan sinergitas dengan masyarakat setempat agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan baik dalam aspek ekonomi, social, budaya, maupun lingkungan.

---

## PENDAHULUAN

Di dalam industri pariwisata, infrastruktur merupakan salah satu hal terpenting dalam mendorong suatu daya tarik wisata. Pada dasarnya, infrastruktur secara tidak langsung dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata (Suwena dan Widyatmaja, 2010). Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendorong peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Adanya kesadaran pemerintah Indonesia akan hal tersebut, maka sejak pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu dari lima sektor strategis pembangunan Indonesia yang sekaligus juga menjadi prioritas pembangunan kabinet kerja. Kelima sektor prioritas pembangunan kabinet kerja tersebut diantaranya adalah Infrastruktur, Maritim, Energi, Pangan, dan Pariwisata. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan program prioritas kerja pada periode kedua Jokowi-Ma'ruf yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas pertama dan program-program lain yang terdiri dari pembangunan SDM, penyederhanaan birokrasi, pemangkasan kendala regulasi, dan transformasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mulai mendorong untuk percepatan pembangunan pariwisata dengan cara membangun infrastruktur-infrastruktur pariwisata, salah satunya adalah Jalur Bedah Menoreh.

Dasar dalam penentuan gagasan pembangunan jalur Bedah Menoreh adalah peluang kondisi strategis Kawasan Borobudur dan sekitarnya sebagai kawasan wisata primer atau sebagai destinasi wisata New Bali. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Otorita Borobudur bekerjasama dengan kementerian PUPR hingga PT. Angkasa Pura merancang inovasi untuk membuka akses baru yang menghubungkan antara bandara YIA dengan kawasan Borobudur. Pembukaan akses baru di jalur tersebut masuk ke dalam Program Bedah Menoreh yang juga berkaitan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Hal ini dijelaskan dalam gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 - 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta hasil identifikasi permasalahan. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Jalur Bedah Menoreh dibangun sebagai pendukung KSPN Borobudur. Sebagai bentuk dukungan dalam percepatan pembangunan jalur Bedah Menoreh, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membebaskan lahan sepanjang kurang lebih 24 km. Program pengembangan wisata melalui Bedah Menoreh dimaksudkan untuk memberikan keuntungan berbagai pihak, diantaranya bagi Kabupaten Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Oleh sebab itu, tujuan dari program ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah utara. Hal ini sesuai dengan UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang di dalamnya disebutkan bahwa jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang merupakan bagian penting dari prasarana transportasi yang berperan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa isu terkait dengan program Bedah Menoreh yang pertama, program ini bertujuan untuk dapat membedah kemiskinan, membedah potensi lokal, dan membedah potensi pariwisata. Kedua, Jalur Bedah menoreh akan dijadikan sebagai jalur utama dari Bandara YIA menuju Borobudur yang melintasi titik-titik tempat wisata yang tersebar di empat kecamatan, sehingga diharapkan wisatawan akan transit ke tempat-tempat wisata di sepanjang jalur tersebut. Pertanyaannya apakah destinasi wisata yang berada di sepanjang jalur Bedah Menoreh dapat menyerap kunjungan wisatawan lebih banyak sehingga dengan kunjungan tersebut akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat? Di samping itu, timbul juga pertanyaan terkait dengan pembangunan infrastruktur pariwisata ini ditujukan untuk siapa?

Menurut Sukwika (2018), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk infrastruktur jalan. Di sisi lain, pembangunan di Indonesia juga sering mengalami ketimpangan sosial-ekonomi. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa gagasan pembangunan jalur Bedah Menoreh memiliki visi dan misi yang baik untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi, apakah pembangunan ini akan memberikan dampak yang sejalan dengan visi dan misi atau sebaliknya mengingat Pemkab Kulonprogo juga memberikan dukungan kepada para investor untuk berpartisipasi dalam

pengembangan kawasan Bedah Menoreh. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk dapat merespon baik program Bedah Menoreh sebagai jembatan dalam pengentasan kemiskinan.

Hingga saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo menduduki peringkat pertama se-DIY dengan persentase sebesar 17,39 % dan dari tiga kecamatan di Kulon Progo yang dilalui jalur Bedah Menoreh, Kecamatan Kokap menjadi daerah dengan penduduk termiskin terbesar (Bappeda DIY: 2019). Oleh sebab itu, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi rencana program pembangunan infrastruktur Bedah Menoreh dan mengidentifikasi apakah program tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mencoba menjawab beberapa rumusan masalah tentang bagaimana kondisi dan progress dari program pembangunan Jalur Bedah Menoreh yang sedang/ akan dibangun? Di samping itu apakah infrastruktur tersebut sudah sesuai dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar?

## METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh melalui data sekunder tanpa dibatasi oleh variabel dan indikator. Selain itu, peneliti juga akan mengamati fenomena yang baru dan unik dari subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Moleong (2006:6), yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami dan mendalami berbagai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian perlu didukung oleh dasar teori yang disebut sebagai *grand concept* (Muhadjir, 2006) dan juga data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar dan dokumen pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat induktif yang mana didasarkan pada studi-studi yang pernah dilakukan, sehingga penelitian ini dapat membangun teori berdasarkan studi yang didapatkan melalui data-data sekunder tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Kebijakan Pembangunan Jalur Bedah Menoreh

Pembangunan Jalur Bedah Menoreh di Provinsi DIY dan Jawa Tengah merupakan sebuah ide atau gagasan besar yang akan dikerjakan pada pertengahan tahun 2021. Realisasi dari gagasan tersebut mulai ditunjukkan melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Berdasarkan kebijakan tersebut, tujuan dari pembangunan Jalur Bedah Menoreh diharapkan mampu memerikan kontribusi positif bagi semua kalangan masyarakat. Pencetusan gagasan pembangunan Jalur Bedah menoreh ini didasarkan pada adanya potensi di jalur tersebut yang sekaligus merupakan bentuk dorongan dalam percepatan pembangunan KSPN Borobudur sebagai destinasi wisata New Bali sehingga akan memudahkan untuk mengakses kawasan Borobudur dan sekitarnya. Pada dasarnya infrastruktur pariwisata dapat dianggap sebagai elemen fisik yang dirancang dan didirikan untuk melayani pengunjung. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam percepatan proses pembangunan nasional karena dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi (Adebayo dan Iweka, 2014). Jalur ini akan dijadikan akses utama dari bandara YIA menuju Candi Borobudur. Dalam hal ini aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan waktu tempuh, sehingga semakin baik aksesibilitasnya maka akan semakin mudah untuk dijangkau dan semakin tinggi tingkat kenyamanannya akan mendorong wisatawan untuk datang berkunjung (Nabila dan Wisiyastuti, 2018). Di samping itu, keberadaan Bandara baru, yakni YIA (Yogyakarta International Airport) merupakan potensi besar sebagai pintu masuk utama wisatawan yang berkunjung ke DIY. Hal ini menyebabkan adanya peluang untuk menarik kunjungan wisatawan ke Borobudur serta peluang untuk mengembangkan pariwisata sekaligus mendorong pembangunan di sepanjang jalur yang dilaluinya. Di samping itu, Jalur bedah menoreh ini merupakan infrastruktur pariwisata sebagai perangkat dan lembaga yang menjadi bahan dan dasar organisasi untuk pengembangan pariwisata (Winklhofer, dan Hamilton, 2006).

Menurut Sukwika (2018), pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berupa jalan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, pertumbuhan ekonomi nasional dapat diperoleh melalui kunjungan wisatawan yang tinggal dan mengeluarkan uang di suatu DTW yang kemudian juga menggunakan fasilitas-fasilitas pariwisata termasuk infrastrukturnya. Dalam hal ini pergerakan wisatawan yang memungkinkan terjadi akibat adanya interaksi antara ketersediaan sumber (waktu luang, uang, infrastruktur) dengan kebutuhan mereka untuk menikmati perbedaan dengan lingkungan sehari-hari (Suwena dan Widyatmaja, 2017). Infrastruktur pada sektor pariwisata juga merupakan unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna wisatawan bisa tenang, aman, dan nyaman berkunjung dalam mendukung keberadaan daerah tujuan wisata (Suwena dan Widyatmaja, 2017). Di samping itu, kemudahan dalam mengakses DTW melalui fasilitas pendukung seperti ketersediaan bandara dan jalan yang baik dan memadai juga merupakan faktor pendorong kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hasil analisis Kondisi Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, disebutkan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan bandara YIA adalah pengurangan kapasitas penumpang pesawat terbang yang sudah melebihi batas. Di samping itu, Bandara YIA

juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan kunjungan wisatawan yang mendukung sektor pariwisata disekitarnya termasuk hingga KSPN Borobudur, Jawa Tengah. Dalam mendorong program tersebut, pemerintah setempat melakukan kerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait, diantaranya adalah pemerintah DIY dan Jawa Tengah yang saling berkoordinasi dalam pembangunan rute alternatif yang akan digunakan sebagai penghubung antara Bandara YIA dengan KSPN Borobudur tersebut, yakni Jalur Bedah Menoreh. Pada dasarnya, Bandara YIA di Kulon Progo saat ini merupakan pintu gerbang baru bagi wisatawan domestic maupun mancanegara.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam *Pressing Issues* yang dirangkum oleh Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan BKPM menyebutkan bahwa beberapa poin fundamental yang dijadikan acuan dalam pembangunan Jalur Bedah Menoreh adalah pertama, banyaknya daerah di kawasan utara Kulon Progo yang berupa dataran tinggi masih sulit diakses akibat infrastruktur yang kurang memadai. Oleh sebab itu, program ini dimaksudkan sebagai bentuk implementasi dari pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan masyarakat di dataran tinggi. Kedua, Program Bedah Menoreh juga berpeluang dalam mendorong KSPN Borobudur. Dalam Booklet yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Kulonprogo (2018) disebutkan bahwa jalur pengembangan Bedah Menoreh merupakan aksesibilitas bandara yang sekaligus merupakan penyangga KSPN Borobudur (Kebun Teh Nglingsgo-Triris, Samigaluh) yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah Kulon Progo yang berada di perbukitan Menoreh. Ketiga, menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah konsep dari pengembangan Jalur Bedah menoreh ini ditetapkan berdasarkan adanya penumpukan wisatawan di Candi Borobudur (*over carrying capacity*), sehingga pembangunan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, Pemprov Jawa Tengah memberikan alternatif pengembangan destinasi wisata di luar Candi Borobudur. Konsep Bedah Menoreh pada dasarnya mencakup tiga kawasan yang berada Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Tritis Kabupaten Kulonprogo. Ketiga kawasan ini merupakan kawasan milik Perusahaan Umum Perhutani.

Dalam *Integrated Tourism Master Plan Borobudur – Yogyakarta – Prambanan (ITMP-BYP)*, disebutkan bahwa terdapat 3 rute alternatif dari Bandara YIA menuju Borobudur. Jalur Alternatif 1 melewati tiga Kabupaten, dua Provinsi, dan dua kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dan Purworejo. Jalur ini merupakan rute via Purworejo yang melewati Koridor Salaman, Jalan Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, jalur alternatif 2 merupakan jalur yang melintasi lima kecamatan dan dua kabupaten, yang terdiri dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Naggulan, Kabupaten Kulon Progo; dan Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Pada Jalur alternatif 2, melalui rute via Sentolo-Naggulan yang berada di koridor Jalan Provinsi DIY. Terakhir adalah Jalur Bedah Menoreh yang merupakan jalur alternatif 3 yang melewati lima kecamatan serta dua kabupaten, yang terdiri dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; dan Mugkid, Kabupaten Magelang. Jalur alternatif ini melintasi koridor Jalan Nasional Wates – Jalan Kecamatan Kebonrejo – Kokap – Tegalrejo – Plono – Pete.

Dari ketiga rute tersebut, jalur alternatif 3 merupakan jalur Bedah Menoreh yang mana akan menjadi jalur utama bagi wisatawan karena di sepanjang jalur ini terdapat potensi wisata yang lebih besar dibandingkan dengan dua rute alternatif lainnya. Rute Alternatif 3 atau Jalur Bedah Menoreh ini memiliki panjang sekitar 56.41 km dengan waktu tempuh 2 jam 40 menit (ITMP-BYP Baseline Tata Ruang dan Prasarana Pariwisata: 2020). Rute ini merupakan rute dengan jarak tempuh terpanjang dan waktu yang lebih lama dibandingkan kedua rute lainnya. Jalur Menoreh merupakan jalur perbukitan yang membentang dari Kulon Progo hingga Jawa Tengah dan memiliki keunggulan dalam pada keindahan alam. Pembangunan Jalur Bedah Menoreh ini dimaksudkan untuk mendukung sektor pariwisata yang nantinya akan melewati beberapa tempat wisata yang terdiri dari Waduk Sermo, Gunung Gajah, Taman Sungai Mudal, Kembang Soka, Goa Kiskendo, Goa Maria Lawangsih, Kebun Teh Nglingsgo, Puncak Widosari, dan akan berakhir di Borobudur.

Pembangunan jalur Bedah Menoreh ini masuk ke dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Renstra DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang dimaksudkan sebagai bentuk percepatan dalam merealisasikan program KSPN Borobudur. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang menyebutkan bahwa Jalur Bedah Menoreh merupakan bagian dari infrastruktur pariwisata. Dalam hal ini mendorong kawasan penyangga dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur (KSPN), yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Di samping itu, penetapan wilayah Kecamatan Samigaluh yaitu Nglingsgo–Tritis sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut antara lain jalur jalan yang baik menuju kawasan dimaksud. Jalur jalan yang dikembangkan dan direncanakan dibangun sekaligus dalam rangka konektivitas KSPN Borobudur dan *Bandara New Yogyakarta International Airport* selain Ruas Sentolo-Dekso-Klango disisi timur wilayah

Kulon Progo dan jalur Bedah Menoreh yang melewati sisi barat Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Adanya program-program tersebut maka, di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2020 disebutkan bahwa kajian aksesibilitas terhadap jalur Bedah Menoreh yang terdiri dari Jalan Provinsi dan Kabupaten akan segera dilakukan.

Di sisi lain, dalam Rencana Strategis (Renstra) Kulon Progo tahun 2017-2022, disebutkan bahwa Pembangunan Jalur Bedah Menoreh merupakan bagian dari rencana strategis Kabupaten Kulonprogo yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Artinya adalah pemerintah Kabupaten Kulonprogo memiliki hak khusus yang diberikan oleh Pemprov DIY maupun Pemerintah Pusat untuk berkontribusi penuh dalam perencanaan pembangunan Jalur Bedah Menoreh yang berada di kawasan Kabupaten Kulonprogo.

Pengembangan Bedah Menoreh merupakan program bersama yang melibatkan 3 Kabupaten. Meskipun demikian, di Kabupaten Magelang dan Purworejo belum menyebutkan secara eksplisit tentang program Bedah menoreh baik di dalam RPJMD, RTRW, maupun Peraturan-peraturan Daerah lainnya. Walau demikian, dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030, kawasan Mungkid-Borobudur disebut sebagai kawasan strategis aktivitas penunjang pariwisata. Di samping itu, Kabupaten Purworejo dalam RTRW tahun 2011-2031 juga menyebutkan bahwa kawasan Menoreh yang masuk dalam Kabupaten Purworejo (Kecamatan Bener, Loano) merupakan kawasan peruntukan pariwisata. Selanjutnya, di dalam pasal 97 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan infrastruktur pendukung kawasan wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata. Artinya, program Bedah Menoreh sebagai pendorong KSPN Borobudur yang sekaligus juga merupakan bagian dari industri pariwisata memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam realisasi program Bedah Menoreh di Kabupaten Magelang dan Purworejo. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BAPPEDA Jawa Tengah mengeluarkan arahan pengembangan pariwisata yang didalamnya disebutkan bahwa Bedah Menoreh masuk ke dalam rencana pengembangan skala makro di bidang infrastruktur dan amenitas sebagai bentuk percepatan pembangunan jalur bedah menoreh serta rencana skala mikro terkait dengan pengembangan kawasan Bedah Menoreh yang meliputi: a) pengembangan jembatan kaca gantung; b) pengembangan kereta gantung; c) Pengembangan kegiatan paralayang; d) Pengembangan cafe; dan e) Pengembangan gazebo.

Arahan kebijakan pembangunan Bedah Menoreh pada dasarnya sudah di design dengan baik agar dapat mencapai tujuan, yakni mengentaskan kemiskinan. NSS, Suryawardana dan Triyani (2015), menyebutkan bahwa infrastruktur pariwisata memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi seperti; a) terciptanya lapangan kerja; b) mempengaruhi iklim investasi; c) penentu integritas sosial-ekonomi masyarakat di suatu daerah dengan daerah lainnya; d) berperan penting dalam produksi di beberapa wilayah. Terbukanya akses jalan dan bertambahnya fasilitas di kawasan pariwisata akan mampu memberikan nilai tambah. Seperti halnya dengan pembukaan jalur dari bandara ke suatu destinasi wisata akan mempermudah wisatawan untuk mengakses dan menjangkau destinasi tersebut. Secara konsep, pembangunan jalur ini merupakan gagasan yang baik, akan tetapi, selain dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakannya, terdapat juga kontra terhadap program ini. Hal ini dibuktikan dengan argument Bupati Purworejo yang menyebutkan bahwa program Bedah Menoreh tidak perlu dibangun karena dinilai tidak menguntungkan bagi semua kawasan sebab, konsepnya memakai jalan layang (<https://www.radarpurworejo.id/24-jam/2021/03/15/tak-perlu-bedah-menoreh>).

## 2. Pembangunan Jalur Menoreh Dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat Setempat

Pembukaan dan pengembangan jalur Bedah Menoreh diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah setempat telah menunjukkan dukungannya terhadap program ini melalui riset-riset lapangan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Program pembangunan Jalur menoreh yang melintasi 4 kecamatan berbeda ini pada dasarnya memiliki kondisi geografis dan demografis yang berbeda-beda. Hal ini membuat terciptanya keberagaman karakter tempat-tempat wisata di sepanjang jalur tersebut. Secara umum, kondisi demografi masyarakat di sepanjang jalur Bedah Menoreh merupakan kawasan dengan kondisi masyarakat menengah ke bawah dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pada dasarnya secara ekonomi, 3 wilayah yang mencakup Kabupaten Kulonprogo, Magelang, dan Purworejo memang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Berdasarkan data dari Bappeda DIY tahun 2019 disebutkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menduduki persentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY, yakni dengan persentase 17,39 %. Dari tiga kecamatan di Kulon Progo yang dilalui jalur Bedah Menoreh, Kecamatan Kokap menjadi daerah dengan penduduk termiskin terbesar. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten ini meningkat dibandingkan dari tahun lalu, yakni 78,06 ribu jiwa dari 74,62 ribu jiwa di tahun 2019. Di samping itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sebesar 137,45 ribu jiwa atau sama dengan 10,67% dan Kabupaten Purworejo sebesar 11,45% atau setara dengan 82,17 ribu jiwa (BPS Prov. Jateng; 2020). Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang dan Purworejo tidak lebih besar dibandingkan Kabupaten Kulonprogo, akan tetapi berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang memiliki

jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dua kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pengembangan bedah menoreh sudah tepat.

Menanggapi isu kemiskinan ini, Pemprov DIY sejak tahun 2019 telah merumuskan Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. Dalam arahan kebijakan ini, terdapat arahan daftar program yang diprioritaskan di Kabupaten Kulonprogo yang didasarkan pada SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, meliputi: (a) Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur atau yang saat ini disebut dengan Jalur Bedah Menoreh; (b) Pembangunan SPAM Regional Sistim Benere, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul; (c) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto; (d) Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh; (e) pengembangan Kawasan Bandara baru Kulonprogo; (f) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo; (g) Pembangunan International Hospital – RSUD Wates; dan (h) Pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP). Jika dilihat dari program-program tersebut, langkah yang diambil pemprov DIY dalam pengentasan kemiskinan lebih mengarah pada pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan bahwa pengembangan kawasan bukit menoreh dan pembukaan akses jalur Temon-Borobudur menjadi prioritas dalam pembangunan. Ini menunjukkan dukungan dan kesungguhan pemerintah setempat dalam pengembangan Bedah Menoreh.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya (BPS Jateng: 2020). Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat kawasan strategis di pertumbuhan ekonomi, yakni Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu yang terdiri dari kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya. Perwujudan kawasan strategis yang dikembangkan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur (BOB); Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo; Kawasan sekitar Bandara YIA (border city); Kawasan Peruntukan Industri; dan Kawasan Agropolitan (PERBUP Kab. Jateng; 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden No.46 Tahun 2017, BOB mengelola lahan seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ± 50 Ha sebagai titik perkembangan baru di kawasan Pegunungan Menoreh yang berada di perbatasan tiga daerah, yakni: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kulonprogo. Kawasan ini didesign sebagai salah satu destinasi wisata baru dengan konsep *nomadic tourism*. Dengan pengembangan konsep wisata ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, keberadaan Bandara YIA diharapkan dapat menjadi stimulan tumbuhnya kawasan *aerotropolis* di Jawa Tengah bagian selatan (PERBUP Kab. Jateng; 2020). Komitmen dalam mengentaskan kemiskinan juga ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang yang menyebutkan bahwa pembangunan difokuskan pada pemerataan infrastruktur publik sebagai solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang dimaksudkan adalah program bedah menoreh ([bappeda.magelangkab.go.id](http://bappeda.magelangkab.go.id)). Di samping itu, kecamatan Mungkid yang menjadi satu-satunya jalur di Kabupaten Magelang yang dilewati Bedah Menoreh ini merupakan daerah relatif tertinggal atau termasuk dalam kategori *Low Growth and Low Income* (Wulandari, 2014). Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa pengembangan Bedah Menoreh memiliki peran penting bagi ketiga kabupaten ini untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.

Pada dasarnya, pengentasan kemiskinan didesign dengan cara mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam mengembangkan wisata yang dilalui Jalur Bedah Menoreh. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan utama adalah pendekatan pembangunan yang dilakukan secara *top down*. Di sisi lain, masuknya investor juga akan berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat setempat. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terus memberikan dukungan penuh terhadap investor yang ingin berinvestasi di kawasan Bedah Menoreh. Pemkab Kulonprogo maupun Purworejo dengan jelas menyebutkan akan membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Bedah Menoreh. Hingga saat ini Badan Otorita Borobudur sebagai salah satu investor telah membangun area wisata alam dengan menjunjung konsep camping di alam. Tempat wisata yang dikelola BOB ini bernama 'De Loan Camp' yang sekaligus merupakan area glamour camping. Tempat wisata ini terletak di kawasan Bukit menoreh yang terletak berdekatan dengan Desa Wisata Nglinggo dan kebun Teh Nglinggo yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, para investor juga akan membangun jembatan gantung di kawasan tersebut.

Konsep besar dari pemikiran/ ide pembangunan jalur Bedah Menoreh adalah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangannya. Skema yang diharapkan dari keberadaan infrastruktur pariwisata juga dalam mendorong kunjungan wisatawan digambarkan sebagaimana mereka membutuhkan seperangkat layanan, baik dari pengelola wisatawan maupun masyarakat setempat dalam membantu menikmati perjalanan wisata. Dengan adanya permintaan akan kebutuhan wisatawan, maka masyarakat memiliki peluang untuk memberikan layanan kepariwisataan dan secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, infrastruktur pariwisata ini selalu dikaitkan dengan pembangunan nasional yang dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Melihat peluang tersebut, maka yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Sejauh ini, pembangunan infrastruktur Bedah menoreh menggunakan pendekatan *top down* yang mana ini dijelaskan oleh Trivedi dan Khan (2014), bahwa kondisi pembangunan dengan pendekatan *top down* membuat kurangnya pendekatan terpadu yang membahas lingkungan binaan dan hasil sosial di mana ini merupakan kelemahan lama dalam banyak kegiatan perencanaan. Dalam hal ini, Trivedi dan Khan (2014) merumuskan bahwa proyek-proyek yang memberikan perbaikan fisik harus berfokus pada upaya peningkatan kapasitas yang didasarkan pada kerja sama dan yang membutuhkan pengembangan masyarakat dalam arti menghasilkan kepemimpinan lokal, kapasitas manajemen proyek dan rasa tanggung jawab masyarakat. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa hasilnya tidak terbatas pada keuntungan individu. Sehingga, jika pembangunan infrastruktur bedah menoreh akan mencapai keberhasilan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam segala prosesnya. Jika melihat pada beberapa literature terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, banyak penelitian telah berfokus pada dampak penyediaan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kurang memperhatikan pada potensi untuk lebih meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur tersebut. Di sisi lain, infrastruktur masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Dukungan pemerintah terhadap investor juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep besar yang telah dirumuskan ke dalam visi misi pembangunan infrastruktur wisata bedah menoreh. Dalam hal ini, Giampiccoli dan Saayman (2018) menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi dalam pendekatan komunitas/masyarakat berasal dari metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaannya yang menggambarkan sikap kontra dari masyarakat terhadap pendekatan *top down* oleh organisasi eksternal seperti LSM, pemerintah, dan elit nasional. Pendekatan ini akan mengarah pada 'partisipasi' yang tidak berfungsi, karena hanya digunakan sebagai perangkat hegemonik untuk mematuhi aturan dan kontrol atas kekuatan yang ada. Permasalahannya adalah bagaimana membantu masyarakat dalam mengembangkan proses kontribusi masyarakat itu sendiri, bukan membuat mereka hanya sekedar berpartisipasi di dalamnya (Giampiccoli dan Saayman; 2018). Ini juga merupakan salah satu hal yang ditakutkan dalam pengembangan CBT di sepanjang koridor bedah menoreh mengingat keberadaan pemerintah yang mendorong investor elit untuk bergabung. Apakah di kemudian hari masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata bedah menoreh atau hanya sekedar dipekerjakan di objek-objek wisata yang dikembangkan oleh investor dan bahkan hanya menjadi penonton dirumahnya sendiri.

Di samping itu, terdapat tantangan bagi pemerintah terkait dengan bagaimana membuat wisatawan untuk tinggal lebih lama dan mengeluarkan uangnya di objek-objek wisata disepanjang jalur Bedah Menoreh, mengingat bahwa objek wisata yang berada di sepanjang jalur tersebut lebih dari 30 objek. Dengan demikian maka masyarakat lokal akan mendapatkan keuntungan secara langsung dari kegiatan pariwisata. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tentang Kajian Fiskal Regional tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa rata-rata *Length of Stay* (LOS) dari kunjungan wisatawan nusantara adalah 2,50 hari, sedangkan untuk wisatawan mancanegara hanya 1,57 hari. Tingkat LOS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 wisatawan mancanegara sebesar 1,70 hari sedangkan wisatawan Domestik sebesar 1,16 malam (Disporapar Kab. Jateng: 2020). Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih fokus dalam memperpanjang LOS dan *spending money* dari wisatawan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar gagasan dari kebijakan Pengembangan Jalur Bedah Menoreh sangat baik karena ditujukan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, pendekatan *topdown* yang diaplikasikan dalam prakteknya dirasa kurang dapat menarik minat masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap investor elit juga dinilai tidak sesuai dengan visi misi awal Pemerintah yang *pro poor*.

Pada dasarnya, pengembangan pariwisata melalui program Bedah Menoreh perlu membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, dalam hal ini adalah Kabupaten Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada, menunjukkan bahwa saat ini pemda Kulon Progo lebih fokus dalam realisasi Bedah Menoreh. Pariwisata sebagai industri yang bersifat *borderless* harus tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat dan aktor-aktor terkait lainnya. Kontribusi dari tiap-tiap pemerintah daerah harus dapat digambarkan secara jelas untuk mengantisipasi adanya konflik kepentingan antar para aktor. Pembangunan infrastruktur pariwisata harus beraskan pada pembangunan yang adil dan merata.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adebayo dan Iweka. 2014. *Optimizing the Sustainability of Tourism Infrastructure in Nigeria through Design for Deconstruction Framework*. American Journal of Tourism Management. 3 (1A): 13–19.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2019*. BPS Kulon Progo: Yogyakarta. ISBN: 978-602-1085-91-2.
- Bappeda DIY. 2020. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020*. Bappeda DIY: Yogyakarta.
- Bappeda Jateng. 2019. *Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*. Bappeda Jawa Tengah: Jawa Tengah.
- Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan BKPM. 2020. *Integrated Tourism Master Plan Borobudur-Yogyakarta – Prambanan: Analisa Kondisi Dasar Rencana Tata Ruang, Kesenjangan Infrastruktur, Atraksi, dan Fasilitas Pengunjung*. Jakarta.
- Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan BKPM. 2020. *Pressing – Issues: Pengelolaan Pariwisata Terpadu Borobudur - Yogyakarta – Prambanan..* Jakarta.
- Coviello, Winklhofer, dan Hamilton. 2006. *Marketing Practices and Performance of Small Service Firms: An Examination in the Tourism Accommodation Sector*. Journal of Service Research 9 (1): 38–58.
- Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. 2019. *Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY: Yogyakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo. 2017. *Perubahan Renstra DPUPKP 2017-2022*. Pemkab Kulon Progo: Yogyakarta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. 2018. *Booklet Potensi dan Peluang Investasi: Mengapa Kulon Progo?*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DIY: Kulon Progo.
- Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka. 2020. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Giampiccoli dan Saayman. 2018. *Community-Based Tourism Development Model And Community Participation*. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 7 (4) - (2018) ISSN: 2223-814.
- Kementerian Keuangan tentang Kajian Fiskal Regional, 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Nabila dan Widiyastuti. 2018. *Kajian Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Pongok di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Jurnal Bumi Indonesia.
- NSS, Prapti, Edy Suryawardana dan Dian Triyani. 2015. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosial-Budaya Volume 17 Nomor 2, Juni 2015: 82 – 103.
- Pemkab Kulon Progo. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Pemkab Kulon Progo. Yogyakarta.
- Pemkab Kulon Progo. 2017. *Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022*. Pemkab Kulon Progo. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030.
- Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2020.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Sukwika, Tatan. 2018. *Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751. Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018, 115-130.

Suwena dan Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan: Bali.

Trivedi, N dan Khan, S. 2014. *Community participation in the delivery of infrastructure: a cross-cultural examination of its impact on the capacity building of local communities*. Australia: Curtin University.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Wulandari. 2014. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Magelang*. Universitas Tidar: Magelang.